

## **BAB II**

### **KEKERASAN SEKSUAL DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA**

Seperti yang sudah disebutkan di bab sebelumnya, selama terjadinya konflik Rusia-Ukraina telah banyak ditemukan kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh para tentara militer Rusia kepada masyarakat Ukraina ketika mereka menduduki wilayah-wilayah di Ukraina. Bentuk kekerasan seksual yang dilakukan cukup beragam, namun yang paling banyak dilakukan adalah pemerkosaan. Korban kekerasan seksual ini didominasi oleh wanita, tetapi laki-laki hingga anak-anak juga menjadi korban kejahatan ini.

Oleh karena itu, dalam bab ini akan menggambarkan lebih lanjut mengenai kekerasan seksual selama konflik Rusia-Ukraina yang terbagi menjadi dua sub-bab. Pada sub-bab pertama akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai situasi konflik Rusia-Ukraina, yaitu pada saat invasi Krimea pada tahun 2014 dan invasi Ukraina pada tahun 2022. Pada sub-bab kedua akan membahas secara detail mengenai bagaimana kekerasan seksual terjadi selama konflik Rusia-Ukraina.

#### **2.1. Konflik Rusia-Ukraina**

*“History is who we are and why we are the way we are.”* Ungkapan oleh David McCullough ini cukup menggambarkan hubungan antara Rusia dan Ukraina. Secara geografis, Ukraina berbatasan dengan negara-negara anggota Uni Eropa di sebelah barat dan Rusia di timur. Secara historis, hubungan antara kedua negara ini dapat ditarik kembali ke masa ketika ‘Kyiv’, ibukota Ukraina saat ini, merupakan jantung dari Kyivan Rus atau yang dikenal juga sebagai asal dari negara Ukraina dan Rusia (Sawal et al., 2023).

Pada tahun 1793, Kekaisaran Rusia pernah menganeksasi Ukraina bagian Barat dan membuat kebijakan '*Russification*' yang bertujuan agar masyarakat mengadopsi agama Rusia Ortodoks dan melarang penggunaan Bahasa Ukraina. Pada abad ke-20, Ukraina akhirnya bergabung dengan Uni Soviet di tahun 1922 setelah melewati perang sipil pada tahun 1917. Namun, pada awal tahun 1930-an, terjadi kelaparan yang mengakibatkan kematian jutaan orang Ukraina. Joseph Stalin, pemimpin Soviet, kemudian mengirim orang Rusia dan penduduk Soviet lainnya untuk membantu mengisi kembali wilayah timur Ukraina (Sawal et al., 2023). Hubungan Ukraina dengan Rusia terus berlanjut hingga akhirnya Uni Soviet runtuh pada tahun 1991 dan Ukraina memperoleh kemerdekaannya di tahun yang sama (NPR, 2022d). Perjalanan sejarah panjang kedua negara ini serta letak geografis yang berdekatan menyebabkan sebagian wilayah Ukraina, khususnya bagian timur, memiliki ikatan yang sangat erat dengan Rusia.

#### **2.1.1. Invasi Krimea di tahun 2014**

Hubungan kedua negara kembali memanas pada akhir tahun 2013. Konflik ini diawali ketika terjadi protes di Ukraina terhadap keputusan Presiden Viktor Yanukovych untuk menunda kesepakatan kerja sama ekonomi dan integrasi dengan Uni Eropa (BBC, 2013). Di saat protes semakin meningkat, presiden Yanukovych meninggalkan Ukraina pada Februari 2014 (The Atlantic, 2014). Sebulan kemudian, militer Rusia mengambil kontrol Krimea, yang merupakan salah satu wilayah di Ukraina. Tindakan ini dijustifikasi oleh Vladimir Putin, Presiden Rusia, dengan dalih ingin melindungi hak etnis Rusia di wilayah tersebut (President of Russia, 2014).

Krimea akhirnya melakukan referendum dengan total sebanyak 95.5 persen suara setuju untuk bergabung dengan Rusia (BBC, 2014a). Setelah referendum Krimea, situasi menjadi semakin memanas dengan semakin banyak gerakan separatis di wilayah-wilayah lain di Ukraina, seperti Luhansk, Donetsk, Kharkiv, Slavyansk, dan Kramatorsk, yang semuanya berlokasi di bagian timur Ukraina (Al Arabiya, 2014; USA TODAY, 2014). Hal ini dikarenakan sebagian populasi dari wilayah-wilayah ini merasa bahwa, secara historis, identitas, Bahasa, dan budaya mereka lebih 'Rusia' dibandingkan 'Ukraina' (Sawal et al., 2023).

Di wilayah-wilayah tersebut, khususnya Luhansk dan Donetsk, kelompok separatis mulai merebut gedung-gedung pemerintah sebagai bentuk protes mereka terhadap pemerintahan Kyiv yang mereka yakini tidak dapat diandalkan kembali (Cavandoli, 2016). Para pemberontak segera meminta untuk melakukan referendum di Luhansk dan Donetsk, dimana 89 persen dan 96 persen memberikan suara untuk mendukung referendum (BBC, 2014b). Menanggapi pemberontakan tersebut, pemerintah Kyiv melancarkan "operasi anti-teroris" untuk mendapatkan kembali kendali atas wilayah yang diduduki pemberontak, yang mengakibatkan pertempuran hebat dan banyak korban berjatuhan (BBC, 2014c, 2014d; The Guardian, 2014). Sejak saat itu, konflik antara kelompok separatis, Rusia, dan Ukraina meningkat. Bahkan setelah Perjanjian Minsk I pada tahun 2014 dan Perjanjian Minsk II pada tahun 2015 ditetapkan agar kedua belah pihak melakukan gencatan senjata, konflik tersebut tetap berlanjut hingga saat ini.

### 2.1.2. Invasi Ukraina di tahun 2022

Tindakan Rusia kembali menarik perhatian ketika memutuskan untuk melakukan latihan militer di perbatasan Ukraina pada bulan April 2021. Semakin lama jumlah tentara militer Rusia terlihat semakin bertambah, terhitung sekitar 100.000 pasukan, yang membuat ketegangan semakin meningkat (Reuters, 2021b). Tindakan ini menimbulkan kecaman dan kekhawatiran dari berbagai pihak atas keputusan Rusia yang dianggap mengancam kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina (AP News, 2022; EEAS, 2021; Gov.UK, 2022). Peningkatan militer Rusia di perbatasan Ukraina menumbuhkan banyak spekulasi bahwa tindakan Rusia tersebut disebabkan oleh hubungan antara Kyiv dan NATO yang juga terlihat semakin meningkat, sehingga menimbulkan ancaman bagi Rusia (International Crisis Group, 2021; Reuters, 2021a).

Ketegangan itu semakin intensif ketika Putin mengumumkan bahwa Rusia mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Luhansk (LPR) dan Republik Rakyat Donetsk (DPR) dari Ukraina pada 21 Februari 2022 (DW, 2022a). Tak lama setelah pengumuman tersebut, Rusia memerintahkan militernya untuk memasuki wilayah teritorial separatis Ukraina sebagai bentuk “penjagaan perdamaian”, seperti yang tertera dalam *Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance* yang ditandatangani oleh Rusia serta pemimpin LPR dan DPR pada saat pengakuan kemerdekaan LPR dan DPR oleh Rusia (The Guardian, 2022f).

Kemudian, pada 24 Februari 2022, Putin mengumumkan akan meluncurkan “operasi militer khusus” di Ukraina (Reuters, 2022c). Operasi ini dimulai setelah kelompok separatis meminta bantuan Rusia untuk menolak agresi tentara Ukraina

(DW, 2022b). Para pemimpin DPR dan LPR menuduh Ukraina telah merusak infrastruktur penduduk dan industri di kedua wilayah tersebut (DW, 2022b). Oleh karena itu, dalam pidatonya Putin menyatakan bahwa operasi militer ini bertujuan untuk melindungi orang-orang, termasuk warga Rusia, yang menjadi sasaran penyiksaan dan genosida oleh rezim Kyiv selama delapan tahun, serta mengupayakan demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina (CNN, 2022a; Reuters, 2022a). Selang beberapa waktu setelah pengumuman tersebut, kekuatan militer Rusia melancarkan serangan rudal dan artileri ke beberapa lokasi di wilayah Ukraina (Al Jazeera, 2022c). Para militer Rusia juga terlihat di beberapa kota di Ukraina, sehingga terjadi baku tembak dan menyebabkan banyak korban luka dan meninggal (Reuters, 2022a). Majelis Umum PBB, dalam resolusinya pada 1 Maret 2022, menyatakan bahwa penyerangan Rusia terhadap Ukraina merupakan bentuk agresi yang melanggar Pasal 2(4) Piagam PBB.

Tidak lama setelah invasi, pada 28 Februari 2022, diskusi pertama antara Rusia dan Ukraina dilakukan di dekat perbatasan Belarus-Ukraina untuk memberhentikan konflik antara kedua negara ini, namun belum menghasilkan kesepakatan apapun (Al Jazeera, 2022a). Diskusi kedua dilanjutkan pada 3 Maret 2022 dan menghasilkan kesepakatan antara Ukraina dan Rusia untuk membangun “koridor kemanusiaan” untuk mengevakuasi penduduk dan mengirimkan obat-obatan serta makanan ke lokasi-lokasi pertempuran terjadi (Reuters, 2022e). Di sepanjang Ukraina, terdapat setidaknya tujuh koridor kemanusiaan yang dibangun, salah satunya di Mariupol (The Washington Post, 2023). Namun, kenyataannya ketika proses evakuasi sedang berjalan, tentara militer Rusia tetap menyerang kota-

kota tersebut yang menyebabkan suasana menjadi kacau (BBC, 2022b). Pada 7 Maret 2022, Rusia menawarkan untuk membangun rute koridor kemanusiaan menuju Rusia atau Belarus, namun ditolak oleh Ukraina (The Guardian, 2022b). Di hari yang sama, diskusi ketiga dilanjutkan yang menghasilkan sedikit perkembangan positif mengenai logistik koridor kemanusiaan (DW, 2022c). Diskusi berikutnya dilaksanakan pada 14 Maret 2022 sebab serangan militer Rusia terhadap Ukraina tidak menunjukkan adanya penurunan (Al Jazeera, 2022d). Namun, diskusi ini kembali berakhir tanpa adanya kesepakatan (NPR, 2022c).

Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia, pada 11 April 2022 menyatakan bahwa Rusia tidak akan memberhentikan operasi militer di Ukraina sampai diskusi perdamaian berikutnya (Reuters, 2022d). Pernyataan ini disampaikan setelah diskusi-diskusi sebelumnya tidak berkembang secepat yang mereka inginkan, dan menuding Barat mencoba menggagalkan negosiasi dengan menuduh pasukan Rusia melakukan kejahatan perang terhadap Ukraina, yang kemudian dibantah oleh Rusia (Reuters, 2022d). Pada 27 Mei 2022, Rusia menyatakan bahwa negosiasi antara kedua negara tidak berjalan sepenuhnya dikarenakan Ukraina, dengan mengklaim bahwa Presiden Zelenskyy “selalu membuat pernyataan yang kontradiktif” (Tass, 2022c).

Pada 30 September 2022, Rusia menandatangani “*accession treaties*” atas aneksasi ilegal empat wilayah di Ukraina, yaitu Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk dan Donetsk (The Guardian, 2022e). Zelenskyy kemudian memberikan respons dengan mengumumkan bahwa Ukraina secara resmi memohon keanggotaan NATO serta menyatakan Ukraina tidak akan melanjutkan negosiasi dengan Rusia selama

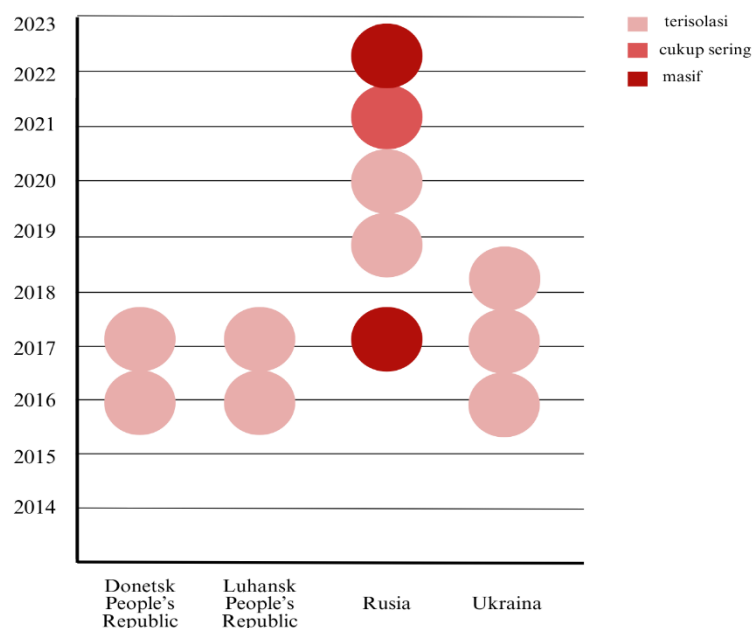
Putin masih menjadi Presiden Rusia (The Guardian, 2022h). Pada 5 Oktober 2022, Putin secara resmi menandatangani undang-undang konstitusional federal mengenai masuknya keempat wilayah tersebut ke dalam Federasi Rusia (Al Jazeera, 2022b).

Konflik antara Rusia dan Ukraina pun terus berlanjut hingga memasuki tahun 2023, dimana perdamaian masih belum dapat terlihat. Tepat satu tahun sejak invasi Rusia, warga Ukraina serta dihadiri oleh Presiden Zelenskyy, berkumpul untuk memperingati hari tersebut dan berencana membuat memorial untuk para korban dari konflik ini (euronews., 2023). Berdasarkan data dari *Office of the UN High Commissioner for Human Rights* (OHCHR), mencatat sejak 24 Februari 2022 hingga 18 Juni 2023, terdapat sebanyak 24.862 korban sipil, termasuk 9.083 korban jiwa dan 15.779 terluka (OHCHR, 2023a).

## **2.2. Kekerasan Seksual dalam Perang Rusia-Ukraina**

Terhitung sejak aneksasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Krimea pada tahun 2014 hingga setelah invasi Ukraina pada 2022 lalu, terdapat laporan bukti kekerasan seksual yang terjadi di Ukraina. Salah satunya, *the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) yang mencatat bahwa telah banyak terjadi kasus kekerasan seksual yang berkaitan dengan konflik Rusia-Ukraina. Namun, kasus-kasus kekerasan seksual ini seringkali kurang dilaporkan, dikarenakan merupakan isu yang sensitif serta adanya stigma negatif. Sehingga, angka kasus-kasus kekerasan seksual yang sebenarnya terjadi diyakini lebih tinggi daripada total angka yang dilaporkan (The Guardian, 2022g).

**Gambar 2.1.** Prevalensi kekerasan seksual yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam konflik Ukraina-Rusia pada 2014 - 2023



Sumber: diolah kembali dari Zodgekar, 2023

Aktor yang dilaporkan terlibat dalam kasus kekerasan seksual selama konflik ini adalah otoritas Ukraina, otoritas Rusia, dan kelompok separatis Ukraina yang didukung oleh pemerintah Rusia, baik secara material maupun politik (Zodgekar, 2023). Aktor yang dilaporkan paling konsisten menjadi pelaku kekerasan seksual adalah Rusia, khususnya pada tahun 2017, dimana Rusia dikabarkan melakukan kekerasan seksual dalam skala yang besar (Zodgekar, 2023). Kekerasan yang terjadi digambarkan sebagai sesuatu yang “meluas” dan “sistematis” (U.S. Department of State, 2018), serta berlangsung, terutamanya, di wilayah Donetsk dan Luhansk, dengan tujuan untuk mempertahankan kendali atau untuk keuntungan pribadi secara paksa (US Department of State, 2017). Kelompok separatis dilaporkan dominan melakukan kekerasan seksual secara terisolasi selama tahun 2016-2017, dan otoritas Ukraina, secara terpisah, juga dilaporkan menjadi pelaku kekerasan



seksual pada tahun 2016-2018 (Zodgekar, 2023). Sejak 2019 dan seterusnya, Rusia menjadi satu-satunya aktor konflik yang dilaporkan menggunakan kekerasan seksual (Zodgekar, 2023).

**Gambar 2.2.** Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam konflik Ukraina-Rusia pada tahun 2014-2023

2023	Rusia						Rusia
2022	Rusia						Rusia
2021	Rusia		Rusia				
2020	Rusia		Rusia				Rusia
2019	Rusia, Ukraina		Rusia			Rusia	Rusia
2018	Ukraina						
2017	Rusia, Ukraina, LPR, DPR		Rusia		DPR, LPR	Rusia, Ukraina	Rusia, Ukraina, LPR, DPR
2016	Ukraina, DPR, LPR					Ukraina	Ukraina, LPR, DPR
2015							
2014							
	Pemeriksaan	Perbudakan Seksual	Prostitusi Paksa	Penghamilan Paksa	Steril/Aborsi Paksa	Mutilasi Skesual	Penyiksaan Seksual

Sumber: diolah kembali dari Zodgekar, 2023

Berdasarkan laporan Departemen Amerika Serikat (2014, 2018, 2019, 2020, 2021) dan OHCHR (2017), bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilaporkan selama konflik adalah pemerkosaan, pemerkosaan kelompok, ancaman pemerkosaan, ancaman pengebirian, ancaman kekerasan seksual terhadap anggota keluarga, pelecehan seksual, penelanjangan paksa, pemaksaan untuk menonton dan melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain, kekerasan terhadap alat genital, penyiksaan seksual, mutilasi, prostitusi paksa, dan penghinaan. Kekerasan-kekerasan ini biasanya digunakan sebagai metode atau alat penyiksaan, serta untuk

menghukum, menghina, atau mendapatkan pengakuan. Di wilayah yang dikuasai oleh kelompok bersenjata, kekerasan seksual juga digunakan untuk memaksa individu untuk memberikan harta benda atau melakukan tindakan lain yang diminta oleh pelaku, sebagai syarat untuk keselamatan dan kebebasan mereka (OHCHR, 2017). Korban dari kekerasan seksual ini didominasi oleh perempuan, meskipun laki-laki juga kerap mendapatkan kekerasan seksual juga.

Pada konflik Krimea, OHCHR sulit untuk mendapatkan informasi mengenai kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi selama konflik akibat terbatasnya akses ke Krimea. Namun, berdasarkan *Belfer Centre* (2023), kasus kekerasan seksual paling banyak terkonsentrasi di Donbas sejak awal invasi Krimea tahun 2014. Dalam laporan situasi HAM Departemen Amerika Serikat (2014) dan *the Washington Post* (2022a) mencatat bahwa kelompok separatis dan otoritas Rusia dilaporkan melakukan penyiksaan dan kekerasan seksual terhadap warga sipil, aktivis pro-pemerintah, dan tentara selama di tahanan atau yang mereka sebut sebagai “kamp konsentrasi”. Laporan ini didukung dengan ditemukannya peningkatan kekerasan seksual yang dialami wanita Ukraina sebanyak 3%, yang awalnya 5% pada tahun 2007 menjadi 8% pada tahun 2014 (Volosevych et al., 2014). Kenaikan terlihat semakin signifikan pada tahun 2018, dimana terdapat peningkatan 76% kasus yang dilaporkan di Donetsk dan 158% di Luhansk (Amnesty International, 2020). Kekerasan seksual juga rentan terjadi di pos-pos pemeriksaan. Dari laporan yang diterima, laki-laki mengalami penyiksaan yang lebih parah dan lebih lama dibandingkan perempuan, tetapi perempuan lebih rentan terhadap pemerkosaan dan pemerkosaan kelompok (OHCHR, 2017).

Salah satu kasusnya adalah ketika *Federal Security Service* (FSB) Rusia menangkap seorang sutradara film, Oleg Sentsov, di Simferopol, pada tahun 2014. Sentsov kemudian disiksa, dipukul, serta diancam dengan pemerkosaan dan pembunuhan untuk mendapatkan pengakuan bahwa Sentsov merencanakan tindakan terorisme di Simferopol, yang kemudian disangkal (Amnesty International, 2018; U.S. Department of State, 2014). Kasus lainnya adalah, pada tahun 2016, seorang pria ditangkap oleh FSB di Krimea atas tuduhan berpartisipasi dalam kelompok Ukraina. Pria tersebut disiksa, diikat ke kursi, disetrum, dan alat genitalnya diikat dengan tali, serta diancam untuk diperkosa dengan tongkat kayu apabila dia tidak mengaku (OHCHR, 2017).

Departemen Amerika Serikat (2021) memperkirakan pada tahun 2021 terdapat sekitar 170-200 korban kekerasan seksual oleh Rusia selama dalam tahanan. Selama penahanan, para korban, baik laki-laki maupun perempuan, menerima pukulan, penyiksaan, penelanjangan paksa, pemerkosaan dengan menggunakan objek, ancaman pemerkosaan terhadap anggota keluarga korban, dan penyetruman di area genital dengan tujuan untuk mempermalukan, menghukum, atau untuk memaksa “pengakuan” (Zodgekar, 2023). Selain itu, korban wanita juga dilaporkan menjadi sasaran penelanjangan paksa dan kekerasan seksual sebagai imbalan untuk melewati pos pemeriksaan (The Conversation, 2022). Terdapat juga laporan mengenai peningkatan kelahiran wanita di usia 40 tahun, yang awalnya terdaftar di rumah sakit sebagai tidak subur, yang dikaitkan dengan kehadiran kelompok militer di beberapa daerah (OHCHR, 2017).

Laporan terhadap kekerasan seksual terkait konflik pun kian meningkat pada saat invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Sebab, skala konflik lebih besar dan tentara-tentara Rusia menduduki lebih banyak kota-kota di Ukraina dibandingkan pada saat invasi Krimea pada 2014 lalu. Dalam artikel *New York Times* (2023), mengungkapkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi didorong oleh para komandan Rusia, dimana komandan tersebut “memberikan instruksi” secara diam-diam untuk melakukan pemerkosaan, dan umumnya mereka melakukan pemerkosaan tersebut dalam waktu dua atau tiga hari setelah mengambil alih suatu wilayah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bukti kekerasan seksual yang dilaporkan tepat setelah Rusia mundur dari area-area yang mereka okupasi di Ukraina (The Guardian, 2022g).

Hal ini terjadi di beberapa kota di Ukraina, seperti Bucha, Irvin, Kharkiv, Lyman, dan Kherson, dimana laporan kekerasan seksual bermunculan setelah tentara Rusia mundur dari wilayah-wilayah tersebut. Ratusan wanita dan anak-anak dikabarkan diperkosa oleh tentara Rusia di wilayah-wilayah tersebut. *Security Service of Ukraine* (SSU) sempat menyadap pembicaraan telepon antara tentara Rusia yang membicarakan bahwa mereka telah membunuh warga sipil dan memperkosa wanita selama okupasi mereka di Lyman, Oblast Donetsk. "*When we surrendered Lyman, we killed everyone there, f\*\*king khokols<sup>1</sup>... We raped them, killed them, shot them there. In Lyman, in Torsk, everyone just walked and was shot. All men, who were younger, were taken there, and the women, these young people:*

---

<sup>1</sup> *Khokols* atau *xoxol* merupakan sebutan penghinaan terhadap etnis Ukraina, dimana kata tersebut diambil dari potongan rambut orang *Cossacks* Ukraina.

*all of them were f\*\*ked, they were killed, they were shot,"* ungkap tentara Rusia dalam percakapan teleponnya (Yahoo News, 2023).

Selama masa awal invasi, banyak ditemukan tubuh-tubuh manusia di jalanan dan hanya ditutupi oleh selimut. Terdapat juga pemakaman massal dari korban-korban penyerangan Rusia di beberapa wilayah di Ukraina. Salah satunya, pemakaman massal di Bucha, pinggiran Kyiv di bagian barat laut. Anatoly Fedoruk, walikota Bucha, mengatakan dalam wawancara bahwa setidaknya 300 penduduk lokal telah dikubur di dua pemakaman massal (Insider, 2022a). Selain itu, masih dapat terlihat mayat-mayat terbaring di jalanan, di luar rumah-rumah, dan di halaman belakang rumah (Insider, 2022b). Beberapa di antaranya dapat terlihat tangannya diikat di belakang dengan luka tembak di bagian belakang kepala, yang diduga hasil eksekusi mati (The Washington Post, 2023). Terdapat bukti juga bahwa para korban diperkosa sebelum dibunuh oleh tentara Rusia (The Guardian, 2022a). Mayat-mayat tersebut sangat sulit untuk diidentifikasi akibat banyaknya yang dimutilasi, terbakar, dan tubuh yang cacat. Lesia Vasylenko, salah satu anggota parlemen Ukraina, menyatakan bahwa saat ini mereka sedang menyaksikan kekejaman terhadap pihak-pihak yang paling rentan dalam konflik, yaitu perempuan yang diperkosa sebelum mereka dieksekusi mati (Independent, 2022). Hal ini menambahkan bukti bahwa pemerkosaan dan penyiksaan terjadi selama beberapa wilayah di Ukraina dikuasai oleh tentara Rusia sejak invasi dilakukan.

Rentang usia korban pemerkosaan dimulai dari empat hingga delapan puluh tahun (CBC, 2022b). Namun, berdasarkan sumber lain, terdapat laporan kasus dimana korban berusia kurang dari empat tahun, seperti kasus anak perempuan

berusia dua tahun yang diperkosa oleh dua tentara Rusia (Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights, 2022). Bahkan, terdapat sebuah kasus dimana seorang ibu diikat dan dipaksa untuk melihat anaknya yang baru berusia sembilan bulan diperkosa dengan menggunakan objek, yaitu menggunakan sebuah lilin (the New York Times, 2022a). Tidak jarang anggota keluarga korban dipaksa untuk menonton pemerkosaan yang dilakukan kepada korban (BBC, 2022c). Seperti salah satu kasus, dimana seorang ibu yang diikat oleh tentara Rusia dan dipaksa untuk melihat pelecehan yang terjadi pada anak perempuannya (the New Yorker, 2022). Selain itu, terdapat kasus dimana dua tentara Rusia masuk ke rumah warga dan memerkosa seorang wanita beberapa kali, serta melakukan kekerasan terhadap suami korban dan memaksa kedua pasangan untuk melakukan hubungan seksual di hadapan mereka. Tidak hanya itu, tentara tersebut juga memaksa anak perempuan korban yang berusia empat tahun untuk melakukan oral seks kepadanya (CNBC, 2022). Setelahnya, para tentara Rusia juga mengancam membunuh dan bahkan membunuh anggota keluarga yang hendak menolong korban (CBC, 2022b; war.ukraine.ua, 2022).

Terdapat banyak kasus kekerasan seksual juga yang terjadi pada remaja. Salah satunya, terdapat seorang remaja yang mendapatkan pelecehan oleh tentara Rusia di rumahnya, dimana tentara tersebut mengatakan mereka akan melecehkannya hingga korban tidak ingin memiliki anak (the New Yorker, 2022). Terdapat kasus lain, dimana seorang remaja berusia 15 tahun diikat di tempat tidur di rumahnya dan diperkosa oleh beberapa tentara Rusia hingga remaja tersebut hamil (the New Yorker, 2022).

Selain itu, laki-laki dan anak laki-laki turut menjadi korban kejahatan ini. Hal ini dikonfirmasi oleh *UN special representative*, Pramila Patten, dalam konferensi pers di Kyiv, dimana Patten menyatakan bahwa terdapat laporan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki dan anak laki-laki (The Guardian, 2022d). Jaksa Umum Ukraina, Iryna Venediktova, juga mengatakan bahwa mereka telah mengumpulkan laporan mengenai kekerasan seksual oleh tentara Rusia terhadap laki-laki dan perempuan dari seluruh kalangan usia (The Guardian, 2022d). Ombudsman Ukraina juga menerima 10 laporan kekerasan seksual dalam kurun waktu satu jam, dimana delapan diantaranya merupakan anak di bawah umur. Detail korban-korban tersebut di antaranya merupakan anak kembar tiga berusia 9 tahun yang diperkosa hingga mengalami luka di bagian genital; anak laki-laki berusia satu tahun meninggal setelah diperkosa oleh dua tentara Rusia; dua laki-laki dewasa yang berusia 67 tahun dan 78 tahun diperkosa oleh tentara Rusia (Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights, 2022). Kasus lainnya adalah seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang diperkosa oleh tentara Rusia di depan ibunya yang menyebabkan anak tersebut terlalu trauma untuk dapat berkomunikasi kembali secara normal (sky news, 2022a).

Beberapa psikologis yang membantu korban-korban kekerasan seksual di Ukraina menceritakan beberapa kasus yang ditanganinya (the New Yorker, 2022). Salah satu kasus yang telah dibawa ke jalur hukum adalah dimana tentara Rusia dituduh masuk ke rumah korban dan membunuh suami korban, serta memperkosa korban di depan anaknya. Tidak jauh berbeda dengan kasus tersebut, seorang wanita diperkosa berkali-kali di ruang bawah tanah selama beberapa hari setelah tentara

Rusia membunuh pacarnya. Hal serupa juga terjadi pada wanita lain, dimana mereka diperkosa oleh beberapa tentara Rusia berkali-kali dalam waktu empat hari. Bahkan terdapat kasus dimana seorang paramedis ditangkap oleh tentara Rusia dan dilecehkan oleh mereka hingga korban mengalami cacat fisik. Akibatnya, banyak korban yang mengalami trauma mendalam, rasa malu, keinginan untuk bunuh diri, bahkan menyalahkan diri mereka sendiri atas apa yang mereka alami.

Tidak lupa juga dengan komunitas LGBTQIA+ yang juga menjadi target kekerasan seksual oleh tentara Rusia selama okupasi mereka di Ukraina. Dalam beberapa kasus ketika orientasi seksual mereka diketahui, sikap diskriminatif langsung muncul, yang menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran oleh komunitas ini (OpenDemocracy, 2023). Seperti salah satu kasus ketika tentara Rusia menahan seseorang setelah mereka mengetahui bahwa orang tersebut *gay*. Lalu, selama di tahanan, korban diperkosa oleh 10 hingga 15 laki-laki hampir setiap malam (OpenDemocracy, 2022). Dalam kasus lain, ketika tiga tentara Rusia menemukan salah satu dari dua korban merupakan *gay*, kedua korban langsung mendapatkan kekerasan seksual secara verbal serta pukulan dari para tentara (OpenDemocracy, 2022). Pengumpulan bukti kasus terhadap komunitas LGBTQIA+ juga sama sulitnya dilakukan dan dengan alasan yang sama juga dengan korban-korban lainnya. Mereka berpikir bahwa lebih baik untuk diam saja karena berada di lingkungan yang homofobia, sehingga mereka juga merasa tidak akan dilindungi (OpenDemocracy, 2023).

Meski telah banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang teridentifikasi dilakukan oleh tentara Rusia selama konflik terjadi, tetapi Rusia tetap menyangkal



bahwa tentaranya menargetkan warga sipil atau melakukan kejahatan perang, dan bersikeras bahwa mereka melakukan “operasi militer khusus” (RFERL, 2023). Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, juga menyatakan dalam pertemuan dengan Dewan Keamanan bahwa tidak ada bukti yang dapat mengkonfirmasi tuduhan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tentara Rusia. *“You, the Western colleagues, won’t manage to exploit the topic of the alleged cases of sexual violence in Ukraine involving Russian servicemen. Fakes and lie is all that you have...not a single fact, not a single piece of evidence.”* tegas Nebenzya (Tass, 2022b). Tuduhan ini dianggap sebagai sebuah teknik yang dilakukan oleh pihak Ukraina dan Barat *“From the very beginning of the special military operation in Ukraine, the unwinding of accusations of sexual crimes committed by Russian servicemen has become a favorite technique of the Kiev regime and our Western colleagues,”* ucap perwakilan Rusia tersebut (Rossiyskaya Gazeta, 2022b).

Keadilan terhadap korban juga sulit untuk dicapai karena sulitnya penanganan terhadap kasus ini, seperti enggan sistem peradilan untuk melakukan penyelidikan dan adanya ketidakkonsistenan antara undang-undang Ukraina dan ketentuan hukum pidana internasional dan hukum humaniter internasional (RFERL, 2020). Selain itu, bukti-bukti yang ada juga terbatas, para tentara sebagian besar sudah menghilang, serta para korban terkadang enggan untuk bersaksi atas penyerangan mereka karena trauma mendalam yang mereka alami dan pesimis bahwa pelaku akan tertangkap (the New York Times, 2022a).

Saat ini, ICC masih melakukan investigasi terhadap invasi Rusia terhadap Ukraina atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan (The

Guardian, 2022c). Investigasi ini akan dimulai dari 21 November 2013 ketika presiden Ukraina saat itu menolak integrasi yang lebih dekat dengan Uni Eropa, yang menyebabkan protes besar dan berujung pada aneksasi Krimea oleh Rusia. Salah satu bukti yang dikumpulkan untuk mendukung tuduhan atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan oleh Rusia adalah kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh tentara Rusia terhadap warga Ukraina. Jaksa Ukraina mengatakan saat ini mereka sedang menginvestigasi dan mengumpulkan bukti-bukti kasus kekerasan seksual terkait konflik yang terjadi (the New York Times, 2022a).